

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Komisaris independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 dengan menggunakan Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris Independen, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan Dewan Komisaris Independen mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen sehingga praktik *tax avoidance* dapat diminimalkan.
2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit belum mampu memengaruhi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Banyak atau sedikitnya anggota Komite Audit tidak menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian.
3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan saham

oleh institusi belum mampu memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Keberadaan investor institusional belum tentu dapat mengendalikan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan.

4. Secara simultan, Komisaris independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan variabel Komisaris independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional sebagai variabel independen, serta Ukuran Perusahaan dan Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai variabel kontrol. Hal ini tercermin dari nilai Adjusted R-Squared yang diperoleh sebesar 50,61%, yang berarti kelima variabel tersebut baru mampu menjelaskan 50,61% variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya sebesar 49,39% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kompensasi manajemen, koneksi politik, intensitas modal, kualitas audit, atau karakteristik tata kelola perusahaan lainnya yang belum dimasukkan ke dalam model penelitian.

2. Dalam proses pengolahan data, dilakukan penghapusan data yang terindikasi sebagai outlier untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem terhadap hasil analisis. Penghapusan data tersebut menyebabkan struktur data penelitian menjadi data panel tidak seimbang (unbalanced panel), sekaligus mengakibatkan jumlah observasi yang dianalisis berkurang dari 75 observasi menjadi 63 observasi sehingga hasil penelitian masih memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan keseluruhan populasi penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan BUMN, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi Komisaris independen sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance guna memperkuat pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan, khususnya terkait peran Komisaris independen dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti kualitas audit, kepemilikan manajerial, intensitas modal, koneksi politik, kompensasi manajemen, atau karakteristik perusahaan lainnya.